KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (CURAT) MELALUI OPERASI SIKAT AGUNG DI POLDA BALI

Ni Kadek Ayu Karin Sri Dara
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: ayukariin03@gmail.com

ABSTRAK

Meningkatnya angka tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polda Bali mengharuskan kepolisian mengambil kebijakan dalam menjalankan kewenangannya untuk menciptakan situasi kamtibmas. Berlandaskan hal tersebut maka Polri Khususnya Polda bali mengambil strategi dengan digelarnya "Operasi Sikat Agung 20225". Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme dan prosedur operasional serta menganalisis faktor-faktor dalam pelaksanaan Operasi Sikat Agung 2025. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, di mana data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan Operasi Sikat 2025. Data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, dokumen resmi kepolisian, serta publikasi ilmiah terkait kasus pencurian dengan pemberatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan strategi tersebut mampu mengungkap seluru target operasi yang ditetapkan, namun belum optimal karena masih terjadi trend peningkatan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya pembaruan regulasi, penguatan kapasitas aparat, dan peningkatan sinergi antara kepolisian dan masyarakat guna mewujudkan sistem penanggulangan kejahatan yang berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan lokal.

Kata kunci: Pencurian Dengan Pemberatan, Operasi Sikat Agung, Kewenangan Kepolisian, Penegakan Hukum, Tindak Pidana.

ABSTRACT

*The increasing number of aggravated theft cases within the jurisdiction of the Bali Regional Police has required the police to adopt policies in exercising their authority to create public security and order. Based on this condition, the Indonesian National Police, particularly the Bali Regional Police, implemented a strategic measure through the conduct of the "*Operasi Sikat Agung 2025*" or "2025 Agung Clean-Up Operation". This study aims to identify the operational mechanisms and procedures as well as to analyze the factors influencing the implementation of Operasi Sikat Agung 2025. This research employs an empirical juridical approach, in which primary data were obtained through direct interviews with officials involved in the implementation of 2025 Agung Clean-Up Operation. Secondary data were collected from statutory regulations, official police documents, and scientific publications related to aggravated theft cases. The results indicate that the implementation of this strategy was able to uncover all predetermined operational targets; however, it has not been fully optimal, as an increasing trend in aggravated theft cases still persists. The implications of this study highlight the importance of regulatory updates, strengthening the capacity of law enforcement personnel, and enhancing synergy between the police and the community in order to realize a sustainable and locally responsive crime prevention system.*

Keywords: aggravated theft, Agung Clean-Up Operation, police authority, law enforcement, criminal offense.